

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya dan ciri khas, karenanya dalam melakukan pembangunan tentulah tidak berjalan di jalan yang mulus. Indonesia juga banyak menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan, salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan (Suharto, 2013:19).

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam alenia ke IV yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah..

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan taraf dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2) juga termuat bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara,
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat diharapkan oleh semua kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia sampai saat ini, yaitu suatu kondisi ketidakmampuan individu, keluarga atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Bhinadi, 2017:9). Sementara itu, kemiskinan adalah keadaan ekonomi buruk yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai persoalan, dengan kata lain sebagai sumber masalah sosial seperti asupan gizi dan pendidikan yang rendah. Namun kondisi ini sebaliknya justru dapat berbalik menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan bahkan berdampak pada terjadinya peningkatan pengangguran (Sjafari, 2014:2).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Sementara persentasi penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT (Nurafia, 2020:1).

Pedoman Umum BPNT (2017:54) mengemukakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Pada tahun 2020, nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000.- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000.- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020).

Kenagarian Simpang merupakan salah satu kenagarian yang berada di bawah kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu kenagarian penerima program BPNT. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terlebih dahulu di kenagarian Simpang, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Hayatul Sisra, S.I Kom. selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping BPNT di Kenagarian Simpang pada hari Selasa, 1 Maret 2022 pukul 10.30 WIB. Diperoleh informasi sebagai berikut:

Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Kenagarian Simpang pada penyaluran BPNT tahap November-Desember 2021 terdapat sebanyak 870 KPM yang menerima bantuan ini. Dari 870 KPM tersebut tersebar di 9 Jorong yang ada. Bantuan ini disalurkan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan program BPNT berupa bahan pangan dengan komoditi beras, telur, ayam, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bahan pangan di e-Warung. Adapun jumlah e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang sebanyak 2 (dua) yaitu Yaslahuddun dan Ahmad Sukri. Dalam proses penyaluran kami mendapati beberapa kendala yang dilaporkan baik oleh pihak e-Warung ataupun KPM yaitu terkait saldo kosong, waktu penyaluran yang tidak konsisten, kualitas bahan pangan yang kurang bagus, serta jumlah e-Warung yang harus ditambah agar tidak terjadi kesulitan dalam pencarian stok bahan pangan oleh e-

Warung sekaligus meminimalisir antrian panjang pada saat penyaluran.

Beberapa kendala tersebut sangat berkaitan dengan salah satu dari 6 aspek keberhasilan program BPNT yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wali Nagari Simpang yakni Bapak Adek Jumailis, S.T., peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa, 1 Maret 2022 pukul 09.00 WIB dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pada pelaksanaan penyaluran program BPNT ini di lapangan ditemui beberapa masalah atau kendala yang dirasakan oleh KPM selaku penerima bantuan diantaranya Saldo Kosong saat pengecekan KKS di agen e-Warung sehingga KPM tidak dapat menukarkan dengan bahan pangan, kualitas bahan pangan yang kurang bagus, dan adanya perbedaan harga bahan pangan yang dijual di e-Warung dengan harga pasaran.

Dengan Adanya program BPNT di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian fenomena atau realitas lapangan tersebut di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dengan fokus pada proses pelaksanaan e-Warung dalam mendistribusikan BPNT, selanjutnya peneliti memberi judul: **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan terlebih dahulu, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Saldo kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera pada agen e-Warung sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Ketidaktepatan waktu penyaluran Program Pangan Non Tunai, seharusnya penyaluran dilakukan sekali sebulan tetapi di lapangan masih terjadi mundurnya waktu pelaksanaan.
3. Ketidaktepatan kualitas bahan pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai..
4. Kurangnya jumlah e-Warung yang tersedia sebagai agen penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai sehingga terjadinya antrian panjang saat penyaluran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini membatasi bahasannya pada pendeskripsian dari masing-masing masalah yang mencakup: penyebab terjadinya saldo kosong, ketidaktepatan waktu, ketidaktepatan kualitas, jumlah e-Warung yang tersedia kurang, pada implementasi program bantuan pangan non tunai di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti sajikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah deskripsi penyebab terjadinya saldo kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai?
2. Bagaimanakah deskripsi ketidaktepatan waktu penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai?
3. Bagaimanakah deskripsi ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang dijual e-Warung dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai?
4. Bagaimanakah deskripsi kurangnya jumlah e-Warung yang tersedia sebagai agen penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya saldo kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Untuk mendeskripsikan ketidaktepatan waktu penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Untuk mendeskripsikan ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang dijual e-Warung dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai.

4. Untuk mendeskripsikan kurangnya jumlah e-Warung sebagai agen penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan/atau penelitian khususnya tentang pengalaman lapangan dalam mengimplementasikan program bantuan sosial pemerintah, sehingga dapat menjadi alternatif potensial sebagai salah satu referensi kajian pustaka atau rujukan bagi penelitian lain yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman objektif sekaligus masukan bagi dinas, aparat pemerintahan, para aktor pelaksana terkait ditingkat kabupaten, kecamatan dan Kenagarian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, khususnya mengenai kendala yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta.